

## Pengaruh Implementasi Good Governance, Pengendalian Internal dan Moralitas Individu Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi

Ni Kadek Sri Utami Dewi\*, Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

\*sriutami110@gmail.com

### Riwayat Artikel:

*Tanggal diajukan:*

9 Februari 2022

*Tanggal diterima:*

30 Juni 2022

*Tanggal dipublikasi:*

31 Agustus 2022

**Kata kunci:** good governance, kecurangan (*fraud*), moralitas individu, pengendalian internal

### Pengutipan:

Dewi, Ni kadek Sri Utami & Dewi, Nyoman Ayu Wulan Trisna (2022). Pengaruh Implementasi Good Governance, Pengendalian Internal dan Moralitas Individu Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12 (2), 491-500.

**Keywords:** *fraud accounting, good governance, individual morality, internal control*

### Abstrak

Penelitian bertujuan guna meraih penemuan-penemuan informatif teruji pada dampak dari: (1) administrasi baik terhadap kesalahan penyajian pembukuan, (2) pengendalian internal terhadap pungutan liar pembukuan, dan (3) kualitas etika individu terhadap kecenderungan fraud pembukuan keliru. BUMDes Kabupaten Banjar. Konfigurasi pemeriksaan penelitian ialah rencana eksplorasi kuantitatif kausal. Subjek penelitian ialah perwakilan di BUMDES Kabupaten Banjar, pasal-pasalnya ialah great administration, inside control, individual ethics quality, dan misrepresentation. Jumlah populasi ialah 105 orang yang semuanya dijadikan satuan persepsi, sehingga termasuk penelitian populasi. Informasi dihimpun melalui persepsi dan pertemuan, serta diperiksa memakai cara pemeriksaan. Hasil pemeriksaan menerangkan (1) Administrasi baik berdampak positif dan sangat besar terhadap fraud pembukuan, (2) Pengendalian internal berdampak positif dan kritis terhadap kesalahan penyajian pembukuan, dan (3) Kualitas mendalam individu berpengaruh positif dan besar terhadap kecurangan pembukuan pada BUMDES di Kabupaten Banjar.

### Abstract

*This review plans to acquire tried illustrative discoveries about the impact of: 1) great administration on misrepresentation bookkeeping, 2) interior control on extortion bookkeeping, and 3) individual profound quality on extortion bookkeeping at BUMDES Kecamatan Banjar. The examination configuration utilized is a causal quantitative. The subject of this study were every one of the representatives in BUMDES Kecamatan Banjar, and the articles were: great administration, inward control, individual profound quality, and extortion bookkeeping. Complete populace of this exploration are 105 representatives who all join became perception unit, along these lines this examination including populace research. Information were gathered by utilizing a perception and meets, and broke down by way investigation. The aftereffects of this study are as per the following: (1) great administration have a positive and huge impact on extortion bookkeeping, (2) interior control has a positive and critical impact on misrepresentation bookkeeping, and (3) individual profound quality has a positive and huge impact on extortion bookkeeping at BUMDES Se-Kecamatan Banjar.*

### Pendahuluan

Kemajuan ekonomi tergantung pada demokrasi ekonomi pemerintah aturan menerangkan daerah layak mengambil bagian berfungsi sedang dikembangkan. Oleh karena itu, otoritas publik secara tegas mendorong perkembangan fiskal di segala bidang dengan mengambil langkah-langkah dan menyusun berbagai strategi guna membangun lingkungan bisnis sehat bagi dunia usaha. Lembaga keuangan memainkan peran penting mendukung bantuan pemerintah individu di suatu negara. Di Indonesia, sebagian besar

penduduk bergantung pada organisasi fiskal guna bantuan keuangan dan tempat guna menyalurkan uang.

Badan Usaha Milik Desa di Bali BUMDES ialah andalan kegiatan fiskal di desa berfungsi sebagai lembaga sosial dan bisnis. BUMDES sebagai lembaga sosial mengutamakan kepentingan daerah melalui komitmennya terhadap penataan administrasi sosial. Motivasi pendirian BUMDES antara lain dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADES) Bali, kemajuan BUMDES di Bali sangat menggembirakan. BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) ialah organisasi bisnis terletak di desa diawasi oleh daerah dan pemerintah setempat dengan tujuan akhir guna mengembangkan ekonomi desa lebih lanjut dan dibentuk dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kecakapan desa.

Dengan kesepakatan BUMDes ialah sebuah yayasan bisnis desa diawasi oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa dengan tujuan akhir guna memperkuat ekonomi desa dan dibentuk dengan kebutuhan dan kecakapan desa, maka berdirinya BUMDES ialah sebuah pencapaian luar biasa potensi ditingkatkan. BUMDES selaras UU Desa diatur antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADES). Penarikan mengikuti sudut pandang, dalam hal pembayaran unik desa diperoleh dari BUMDES. BUMDES mempunyai beberapa lembaga sah yang menjadi premis dan acuan keseluruhan implementasinya. Pendirian BUMDES bergantung pada Undang-Undang Nomor32 Tahun2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor72 Tahun2005 tentang Desa. Secara lengkap premis sah ialah UU Nomor32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan tegas Pasal 213 ayat 1 berbunyi "Desa menyelenggarakan usaha-usaha dimiliki desa selaras dengan kebutuhan dan kecakapan desa". BUMDES mempunyai peran vital perekonomian jaringan pedesaan mengingat BUMDES menggarap jaringan bantuan pemerintah provinsi. Di Kabupaten Buleleng, peningkatan BUMDES telah teramati peningkatan dan kemajuan lebih besar sejak dibentuk pada tahun 2014 (Warta Ekonomi, 2018). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Buleleng mempunyai berbagai jenis organisasi, seperti dana investasi dan administrasi muka, pertokoan, tempat parkir, pemborosan para eksekutif, kelautan, industri perjalanan, industri perjalanan, air minum, hewan, papan pasar, dan lain-lain. Jumlah BUMDes di Kabupaten Buleleng sebanyak 117 BUMDes tersebar di utara sembilan kecamatan di Kabupaten Buleleng dengan sumber daya lengkap Rp.97,6M (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buleleng, 2019).

BUMDES juga dapat membuka kesempatan dan alokasi pekerjaan setara guna penduduk pedesaan dengan bekerja langsung di BUMDES. Kehadiran BUMDES di daerah pedesaan mengalami peningkatan cepat. Hal ini tercermin dari pencapaian BUMDES mengembangkan potensi pedesaan dan mengurangi pengangguran penduduk desa. Namun, berbagai BUMDES mengalami kegagalan karena permasalahan yang dialami BUMDES menjalankan usahanya. Salah satu isu penting diperhatikan oleh BUMDES menyelesaikan latihan usaha guna meraih tujuan di bidang ekonomi ialah adanya demonstrasi atau kecurangan inspeksi aset di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Kecurangan atau fraud sesaat selayaknya menjadi penyajian palsu dari realitas material mewujudkan seseorang mempunyai sesuatu (Tunggal, 1992). Sementara, mengikuti *Association of Certified Fraud Examiners* (2012), fraud ialah demonstrasi dilaksanakan dengan sengaja oleh satu individu guna memanfaatkan aset asosiasi secara tidak adil (bertindak ilegal) dan mendistorsi realitas (menyembunyikan realitas) guna peningkatan individu.

Hingga kini, kasus kecurangan atau fraud di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) masih terjadi, salah satunya ialah kasus kecurangan terjadi di Kabupaten Buleleng ialah kasus kecurangan di BUMDes di Kabupaten Banjar, khusus BUMDes di Desa Tirta Sari diungkap dari Nusabali.com (6 Maret 2021), ibarat belum lama diumumkan, Kepala Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sadu Amertha Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Buleleng, Gede Sukaraga, 49, sebagai pelaksana BUMDES didelegasikan Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng sebagai tersangka kasus dugaan penyelewengan aset atau penurunan taksir penatausahaan cadangan BUMDES. Dampak tersebut, Negara ditaksir mengalami kekurangan sekitar Rp. 80 juta lebih. Dugaan penyelewengan aset bermula ketika Desa Tirtasari pada 2012 mendapat pembayaran Rp 1.020.000.000 dari Pemerintah Provinsi Bali

dalam Program Gerbang Sadu Mandara (GSM). Aset bertambah hingga lebih dari Rp. 1 miliar dipakai dana simpan pinjam BUMDes sebesar Rp. 800 juta, dan Rp. 200 juta guna perbaikan pondasi desa, dan Rp. 20 juta guna kegiatan fungsional BUMDES. Kemudian, dari tahun 2014 hingga 2017, tersangka sukaraga menjadi pengurus BUMDES Sadu Amerta Desa Tirtasari melangsungkan pinjaman uang muka kepada BUMDES yang diperolehnya sendiri dengan memakai nama 6 orang lainnya guna menjadi klien BUMDES. Sukaraga mengajukan kredit dengan mencatat nama-nama. Setelah cadangan kredit dicairkan, dipakai oleh Sukaraga dan satu klien BUMDES guna kepentingan individu. Kemudian, uang tunai kredit diterima oleh salah satu klien dikembalikan, tetapi tidak disimpan oleh sukarelawan ke kas BUMDES. Dari informasi dan kenyataan, teramati salah satu unsur mewujudkan BUMDES dikenang guna golongan pencurian aset ialah karena tidak berdayanya administrasi BUMDES. Ketidakberdayaan administrasi disebabkan oleh beberapa unsur, salah satunya ialah adanya kecurangan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Mengingat keberadaan BUMDes berada dalam kondisi penyelewengan aset, penaksiran kesejahteraan BUMDes menjadi penting guna dilangsungkan secara konsisten. Penaksiran kesehatan BUMDES sangat berharga guna menentukan pengaturan dipakai tujuan akhir mengikuti koherensi bisnis dan kegiatan BUMDES sehingga dapat menyaingi berbagai jenis organisasi. Pada dasarnya fraud ialah suatu perbuatan dilangsungkan oleh orang-orang tidak dapat dipercaya dan hanya memanfaatkan hak-hak istimewa orang lain dengan sengaja guna kepentingan individu. Selaras dengan Amin Wijdjaja, (2013) dalam Nafi, (2015), fraud di dalam dan di luar ialah jenis misrepresentasi yang sering terjadi di organisasi atau kantor. Perbuatan tidak senonoh dari pimpinan, pengawas, dan perwakilan terhadap organisasi ialah misrepresentasi batin, sedangkan fraud dilangsungkan oleh perkumpulan luar ke organisasi ialah misrepresentasi lahiriah.

Mengamati kasus ini, penting untuk mengambil langkah membatasi fraud di BUMDES Kabupaten Buleleng. Salah satu cara dilangsungkan ialah dengan lebih mengembangkan budaya hierarkis selayaknya dimungkinkan dengan mengaplikasikan standar administrasi perusahaan baik (Tunggal, 2010). Forum guna Tata Kelola Perusahaan di Indonesia (FCGI) mencirikan Tata Kelola Baik sebagai sekumpulan pedoman menentukan relasi antara otoritas publik, pekerja dan mitra dalam dan luar lainnya selaras dengan kebebasan dan komitmen atau kerangka kerja mengoordinasikan organisasi atau asosiasi (Saftarini, 2015). Selaras Peraturan Pemerintah Nomor101 Tahun2000, Pemerintahan Baik ialah penyelenggaraan pemerintahan menciptakan dan mengaplikasikan standar kecakapan, tanggung jawab, keterusterangan, bantuan luar biasa, sistem suara, kecakapan, kelangsungan hidup, hukum dan ketertiban mengesankan dan diakui oleh seluruh daerah setempat. Penggunaan standar sangat penting guna mempunyai pilihan bekerja pada sifat laporan fiskal secara keseluruhan. Implementasi *Good Governance* berjalan baik menghasilkan ringkasan fiskal berkualitas jauh dari praktek-praktek palsu (Husna, 2008). Dalam tinjauan, ada beberapa penanda mengisi sebagai semacam perspektif implementasi *Good Governance*, yakni keterusterangan, tanggung jawab dan taksir tunai, ketiga petunjuk ialah atribut prinsip *Good Governance* dan mengingat petunjuk berbeda guna: 1) Keterbukaan dicirikan dengan adanya transparansi badan-badan publik dalam mewariskan data dan paparan kepada masyarakat secara umum terkait dengan implementasi pemerintahan. 2) Akuntabilitas, sebagai jenis komitmen guna mewakili pencapaian atau kekecewaan melaksanakan tujuan utama asosiasi meraih tujuan dan sasaran didelegasikan sebelumnya. 3) *Value for Money*, ialah gagasan administrasi hierarkis area publik mempertimbangkan tiga komponen mendasar, yakni ekonomi, kecakapan, dan kecukupan (Pangestika, 2016).

Selain itu, *Good Governance* dimanfaatkan sebagai pedoman guna lebih mengembangkan kelangsungan dan produktivitas pemanfaatan aset otoritatif dengan memangku contoh relasi antara otoritas publik, bisnis pribadi, dan daerah sehingga ada aturan sempurna, mayoritas dan memaksa organisasi pemerintahan mengikuti kepercayaan pengaturan masyarakat umum sejahtera. Sejalan dengan itu, implementasi *Good Governance* ideal mencegah peluang-peluang berharga guna melangsungkan demonstrasi-demonstrasi palsu. Penjelasan analisis melibatkan variabel *Good Governance* sebagai faktor

bebas ialah karena ada kesalahan hasil eksplorasi sebelumnya sehingga analisis perlu melangsungkan penyelidikan lebih lanjut.

Mengingat hasil penelitian Ratnayani (2014), melisankan implementasi *Good Governance* mempunyai konsekuensi negatif substansial terhadap kesalahan penyajian pembukuan. Ini ialah hasil dari implementasi *Good Governance* efek pada titik fokus organisasi pengelolaan dalam pembagian tugas, kewajiban, dan manajemen lebih jelas. Implementasi administrasi baik menghasilkan ringkasan fiskal berkualitas jauh dari praktek palsu. Sejalan hasil eksplorasi Saftarini (2015) mengutarakan implementasi administrasi baik mempunyai konsekuensi negatif substansial pada pembukuan kecurangan. Setiap perkumpulan atau organisasi diandalkan guna melangsungkan dan mengikhtiarkan implementasi administrasi baik guna meredam secepat mungkin kecurangan terjadi. Bagaimanapun, tidak sama dengan hasil eksplorasi Kurniawan dan Izzaty (2019) melisankan implementasi *Good Governance* mempunyai hasil positif substansial terhadap kesalahan penyajian pembukuan, dan menerangkan ketika sebuah asosiasi benar-benar menjalankan Tata Pemerintahan Baik, umumnya fraud tidak pernah terjadi.

Faktor lain mempengaruhi kecenderungan fraud ialah kontrol internal baik mempersiapkan organisasi guna menghadapi transisi keuangan cepat guna kemajuan di masa depan (Hermiyetti dan Manik, 2010). Kemudian, kontrol interior lemah memperhitungkan lebih banyak kesalahan dan representasi salah (Putri, 2014). Kelangsungan pengendalian interior mempunyai dampak luar biasa mencegah kecenderungan misrepresentasi pembukuan, dengan adanya pengendalian batin, akibatnya pengecekan pekerjaan seseorang oleh orang lain (Zainal, 2013). Unsur utama munculnya demonstrasi curang ialah karena disparitas kerangka kontrol interior, adanya ketidakseimbangan data dan pemerataan distributif. Implementasi sistem kontrol internal sebuah asosiasi sangat penting sejauh penaksiran umum dari latihan hierarkis, baik dalam hal administrasi otoritas maupun sistem dipakai menjalankan asosiasi. Sistem kontrol internal tidak hanya benar-benar mengamati angka-angka dalam ringkasan anggaran dan melindungi sumber daya perusahaan, tetapi berpusat di sekitar struktur hierarkis dan menyelidiki pencapaian strategi administrasi. Jadi dengan asumsi asosiasi menjalankan kerangka kerja kontrol orang dalam kuat, sebenarnya ingin membatasi fraud asosiasi. Oleh karena itu, pengendalian orang dalam sangat penting guna membatasi terjadinya fraud pengendalian ke dalam berhasil dilangsungkan menutup kemungkinan adanya kecenderungan pemalsuan dalam pembukuan (Adelin dan Fauzihardani, 2013). Instansi Pemerintah layak menjalankan Sistem Pengendalian Intern guna mencegah demonstrasi curang merugikan kantor. Eksekusi Sistem Pengendalian Intern baik diandalkan guna memacu dan memperluas pemenuhan pekerjaan representatif. Dengan adanya kontrol interior layak di dalam suatu organisasi, memungkinkan pemeriksaan silang pekerjaan seseorang oleh orang lain. Hal ini mengurangi kemungkinan fraud dan mencegah terjadinya inkonsistensi merugikan organisasi. Penjelasan analisis melibatkan variabel Pengendalian Internal sebagai faktor bebas eksplorasi ialah karena ada inkonsistensi hasil pemeriksaan sebelumnya, sehingga analisis tertarik mengeksplorasi terkait variabel ini.

Mengikuti hasil pemeriksaan Yuliani (2018), terungkap pengendalian internal berdampak positif dan substansial terhadap pembukuan kecurangan. Hasil pemeriksaan Fitri (2016) mengutarakan inside control mempunyai konsekuensi merugikan tidak penting terhadap kesalahan penyajian pembukuan. Akibat eksplorasi Asta (2016) mengutarakan pengendalian batin berdampak negatif dan besar terhadap kecurangan pembukuan. Namun unik terkait dengan hasil pemeriksaan Kusumastuti (2012) melisankan kecukupan pengendalian orang dalam tidak berdampak besar terhadap kesalahan penyajian pembukuan.

Selain implementasi *Good Governance* dan pengendalian internal, tekad individu juga menjadi alasan fraud pembukuan. Kualitas mendalam individu Welton (1994) melisankan kapasitas tunggal guna menentukan situasi moral dipengaruhi oleh tingkat spekulasi moralnya. Dampak beberapa pemeriksaan di Liyanarachchi menerangkan tingkat tunggal spekulasi moral mempengaruhi perilaku moral. Individu dengan tingkat spekulasi moral rendah bertindak secara unik berbeda dengan individu dengan tingkat spekulasi moral

substansial ketika dihadapkan dengan masalah moral. Ibarat Rest dan Narvaez (1994) dalam Liyanarachchi (2009), semakin tinggi tingkat spekulasi moral seseorang, semakin besar kemungkinannya mewujudkan 'pilihan terbaik'.

Moralitas ialah moral atau standar dan taksir berkaitan kebesaran dan kedengkian. Kekeliruan dalam sebuah yayasan dipengaruhi oleh kualitas luar biasa dari perwakilan bekerja di dalamnya. Sebuah organisasi pasti mempunyai banyak orang bekerja pada setiap bagian. Setiap individu mempunyai derajat kualitas berbeda-beda dan sangat mempengaruhi kecenderungan misrepresentasi mungkin muncul. Kualitas mendalam individu mempengaruhi perilaku moral. Perilaku eksploitatif muncul dengan alasan pekerja merasa kecewa dan bingung dengan hasil organisasi serta manajemen administrasi lemah dapat membuka kehati-hatian perwakilan guna melangsungkan tindakan merugikan organisasi. Pembeneran memasukkan variabel volume usaha sebagai faktor bebas ialah dengan alasan eksplorasi sebelumnya masih tersirat disparitas hasil penelitian, sehingga analisis tertarik mengarahkan eksplorasi lebih lanjut.

Mengikuti penelitian Hartati, dkk (2020) melisankan kualitas mendalam tunggal mempunyai hasil konstruktif kritis terhadap kecenderungan kesalahan penyajian pembukuan, dan menyiratkan semakin tinggi tingkat kualitas mendalam individu, semakin rendah kecenderungan guna melangsungkan fraud. Bagaimanapun, tidak sama dengan konsekuensi eksplorasi Eliza (2015) dan Suartini dan Mediatix (2020) melisankan kualitas etika tunggal mempunyai dampak negatif dan besar terhadap kecenderungan misrepresentasi pembukuan adil dan merata.

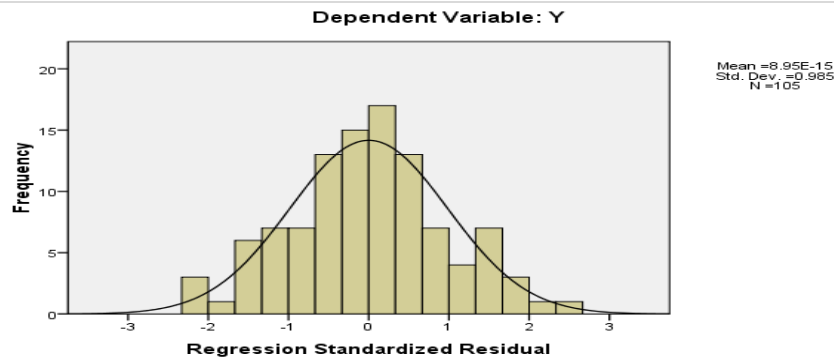
Penelitian dilangsungkan di BUMDES di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng mengingat ada contoh misrepresentasi terhadap cadangan diberikan oleh pemerintah biasa. Menyinggung klarifikasi, banyak tinjauan misrepresentasi pembukuan dilangsungkan, hanya dicoba dengan beberapa petunjuk dipakai guna memutuskan variabel-variabel penyebab terjadinya kecurangan, termasuk misrepresentasi laporan anggaran, penyalahgunaan sumber daya dan demonstrasi penghinaan. GAP penelitian ialah masih tersirat kesalahan-kesalahan hasil pemeriksaan sebelumnya sehingga analisis tertarik melangsungkan eksplorasi lebih lanjut. Keingintahuan eksplorasi terletak pada daerah pengujian, serta populasi dan prosedur jaminan tes unik dalam kaitannya dengan penelitian masa lalu, eksplorasi ini analisis melangsungkan penelitian di Kabupaten Banjar dengan strategi inspeksi mendalam, meneliti kuantitas populasi dan tes ialah sesuatu sangat mirip, khususnya 105 responden.

## Metode

Desain penelitian dipakai ialah kuantitatif kausal. Penelitian diarahkan guna mendapati dampak implementasi Good Governace, pengendalian intern dan moralitas individu terhadap kesalahan penyajian pembukuan pada BUMDES di Kabupaten Banjar. Faktor-faktor tinjauan ialah X1, Good Governace, X2 pengendalian intern, moralitas individu, dan variabel terikatnya ialah Y, kecurangan. Subjek tinjauan ialah pekerja BUMDES di Kabupaten Banjar, sedangkan item ialah kecakapan representatif, gaji, dan eksekusi. Populasi tinjauan berjumlah 105 orang. Jenis informasi dipakai tinjauan ialah informasi esensial. Sumber informasi ialah informasi esensial, khususnya informasi didapat langsung dari sumbernya. Informasi penting ialah tanggapan responden terhadap jajak pendapat dihimpun dari BUMDES di Kecamatan Banjar, Kabupaten Bulelen. Strategi pemerolehan informasi ialah dengan memanfaatkan survei dan pertemuan diselenggarakan. Metode penyelidikan informasi dipakai eksplorasi ialah cara pemeriksaan (*path analysis*).

## Hasil dan Pembahasan

Memutuskan informasi telah memenuhi uji asumsiklasik guna normalitass teramati metode guna bagan histogram, pada dasarnya dengan membandingkan informasi asli dan garis lengkung berbentuk. hasil dari penelitian menerangkan informasi asli membentuk tikungan secara umum dengan rata-rata (0,00), menyiratkan informasi tersisa dipakai dalam model regresi penelitian ini diselaraskan pada Gambar 1 di bawah.



Gambar 1  
Grafik Histogram

Salah satu metode menemukan adanya manifestasi multikolinearitas ialah dengan memikirkan koefisien synchronous assurance dari faktor bebas pada variabel dependen dalam pekerjaan relaps dengan koefisien assurance antara faktor otonom dalam pekerjaan asisten relaps. Dengan asumsi taksir Tolerance esteem lebih besar dari 0,10 atau Variance Inflation Factor (VIF) lebih sederhana dari 10, dianggap tidak terjadi multikolinearitas. Konsekuensi dari uji multikolinearitas dari tinjauan layak teramati pada Tabel1 berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinieritas

No	Variabel Bebas	Tolerance	VIF	Keterangan
1	<i>Good Governance</i>	0,717	1,396	Bebas Multikolinieritas
2	Pengendalian Internal	0,724	1,381	Bebas Multikolinieritas
3	Moralitas Individu	0,974	1,027	Bebas Multikolinieritas

Mengikuti hasil uji multikolinearitas pada Tabel 1, teramati taksir resistansi ketiga faktor tersebut lebih besar dari 10% atau 0,1 dan taksir VIF ketiga faktor tersebut membawahi 10. Jadi diulaskan tidak ada indikasi multikolinearitas dalam model relaps dari tinjauan.

Berbagai rencana investigasi kekambuhan langsung memutuskan dampak variabel otonom pada variabel terikat. Dalam ulasan, efek samping dari investigasi kekambuhan langsung berbeda layak teramati pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel2. Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien $\beta$	Standar Error
Konstanta	.760	.695
<i>Good Governance</i> ( $X_1$ )	.285	.065
Pengendalian Internal ( $X_2$ )	.360	.066
Moralitas Individu ( $X_3$ )	.379	.060

Mengingat hasil, berbagai kondisi kekambuhan langsung dapat diatur berikut:

$$Y = 0,760 + 0,285X_1 + 0,360X_2 + 0,379X_3 + e$$

1. Taksir konsisten ialah 0,760, ini menerangkan jika faktor-faktor administrasi baik, pengendalian internal dan kualitas individu mendalam, jika dianggap stabil (0), kesalahan penyajian pembukuan ialah 0,760.
2. Koefisien relaps variabel administrasi baik ( $X_1$ ) sebesar 0,285. Ini berarti setiap ekspansi 1% administrasi besar meningkatkan fraud pembukuan sebesar 0,285.
3. Koefisien relaps variabel kontrol dalam ( $X_2$ ) ialah 0,360. Ini menyiratkan setiap 1% ekspansi di dalam kontrol membangun fraud pembukuan sebesar 0,360.
4. Koefisien kekambuhan variabel kualitas etika tunggal ( $X_3$ ) ialah 0,379. Ini menyiratkan setiap kenaikan 1% kualitas mendalam individu membangun misrepresentasi pembukuan oleh 0,379.

Hasil pengujian koefisien assurance (R<sup>2</sup>) layak teramati pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.762	.581	.568	1.00773

Mengingat konsekuensi dari koefisien jaminan, luas RSquare ialah 0,581. Konsekuensi dari perhitungan terukur menyiratkan kapasitas faktor bebas (administrasi baik, kontrol batin dan kualitas etika individu) mengklarifikasi transisi variabel terikat (misrepresentasi pembukuan) ialah 58,10%, kelebihan 41,90% dijelaskan oleh berbagai faktor di luar model kekambuhan diuji.

Efek samping dari uji T teramati pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Uji T Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.760	.695		1.705	.091
X <sub>1</sub>	.285	.065	.333	4.375	.000
X <sub>2</sub>	.360	.066	.413	5.456	.000
X <sub>3</sub>	.379	.060	.415	6.356	.000

Mengikuti tabel, diketahui X<sub>1</sub> mempunyai taksir  $t_{hitung}=4,375 > t_{tabel}=1,9755$  dengan tingkat substansial sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima. Sehingga X<sub>1</sub> berpengaruh terhadap Kredit Y. X<sub>2</sub> mempunyai taksir  $t_{hitung} = 5,456 > t_{tabel} = 1,9755$  dengan tingkat substansial sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>2</sub> diterima. Sehingga X<sub>2</sub> berpengaruh terhadap Y. X<sub>3</sub> mempunyai taksir  $t_{hitung} = 6,356 > t_{tabel} = 1,9755$  dengan tingkat substansial sebesar  $0,002 < 0,05$ , maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>3</sub> diterima. Sehingga X<sub>3</sub> berpengaruh terhadap Y.

Hasil penelitian uji F diamati pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	141.977	3	47.326	46.603	.000 <sup>a</sup>
Residual	102.567	101	1.016		
Total	244.544	104			

Mengikuti hasil,  $F_{hitung}46,603 > 2,66 F_{tabel}$  dan besar guna administrasi yang baik, pengendalian batin, dan kualitas etika individu ialah 0,000 atau di bawah 0,05. Jadi model kekambuhan administrasi yang baik, pengendalian batin, dan kualitas mendalam individu pada saat yang sama mempengaruhi fraud pembukuan.

Diamati dari hasil uji menerangkan good governance berdampak positif dan besar terhadap kesalahan penyajian pembukuan pada BUMDES di Kabupaten Banjar. Hal ini didapat dari taksir  $t_{hitung} = 4, 375 > t_{tabel} = 1,9755$  dengan derajat besar  $0,000 < 0,05$ , maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diakui. Begitu besar pengaruh administrasi pembukuan fraud. Besar koefisien relaps variabel administrasi (X<sub>1</sub>) ialah 0,285. Ini mengimplikasikan setiap kenaikan 1% dalam administrasi baik membangun kesalahan penyajian pembukuan sebesar 0,285. Grand Theory yang dipakai eksplorasi ialah Fraud Triangel Theory, yakni tensi spesifik. Dari hasil eksplorasi menerangkan taksir  $t_{hitung}= 4,375 > t_{tabel} = 1,9755$  dengan derajat besar  $0,000 < 0,05$ , maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diakui. Sebagaimana ditunjukkan Saftarini (2015) *Good Governance* ialah sekumpulan pedoman menjabarkan relasi antara otoritas publik,

perwakilan dan mitra ke dalam dan luar lainnya sebanding dengan hak dan komitmen atau kerangka kerja mengkoordinasikan dan mengontrol substansi. Jadi penanda ketegangan segitiga fraud mempunyai relasi nyaman dengan salah satu faktor dipakai tinjauan, khususnya *Good Governance*, dengan alasan penggunaan *Good Governance* ideal mencegah terjadinya misrepresentasi. Dikuatkan oleh hasil pemeriksaan observasional Kurniawan dan Izzaty (2019) melisankan administrasi perusahaan baik berpengaruh positif terhadap penanggulangan kecurangan diakui. Sehingga diulaskan administrasi yang baik berpengaruh positif terhadap fraud pembukuan.

Diamati dari hasil tinjauan menerangkan pengendalian orang dalam terhadap kecurangan pembukuan pada BUMDES Kabupaten Banjar mempunyai hasil konstruktif, ini diperoleh dari taksir  $t_{hitung}=5,456 > t_{tabel}=1,9755$  dengan derajat kritis  $0,000 < 0,05$ , kemudian, pada saat itu,  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diakui. Jadi pengendalian batin mempengaruhi kesalahan penyajian pembukuan. Mengingat efek samping dari koefisien jaminan, diamati ukuran  $R$  Square ialah 0,581. Koefisien relaps variabel kontrol dalam ( $X_2$ ) ialah 0,360. Ini berarti setiap peningkatan 1% pengendalian orang dalam meningkatkan fraud pembukuan sebesar 0,360. Grand Theory dipakai ialah *Fraud Triangel Theory*, khususnya defense. Dari hasil eksplorasi menerangkan taksir  $t_{hitung}=5,456 > t_{tabel}=1,9755$  dengan derajat besar  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diakui. Dalam hal seseorang mempunyai tingkat spekulasi moral tidak dapat disangkal, individu memutuskan guna tidak menyebabkan hal-hal dapat merusak suatu asosiasi. Akibatnya, pointer pertahanan dalam segitiga fraud mempunyai relasi nyaman dengan faktor moral individu. Dikuatkan dengan hasil pengujian observasional Yuliani (2018) melisankan inside control mempunyai dampak positif dan kritis terhadap kesalahan penyajian pembukuan. Jadi diulaskan pengendalian ke dalam mempunyai dampak positif dan kritis terhadap kesalahan penyajian pembukuan.

Mengikuti hasil review menerangkan kualitas etika tunggal terhadap kesalahan penyajian pembukuan pada BUMDES di Kabupaten Banjar mempunyai hasil yang konstruktif, hal ini diperoleh dari taksir  $t_{hitung} = 6,356 > t_{tabel} = 1,9755$  dengan derajat besar  $0,002 < 0,05$ , kemudian,  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diakui. Dengan tujuan kualitas luar biasa tunggal mempengaruhi kesalahan penyajian pembukuan. Mengingat konsekuensi dari koefisien jaminan, diamati luas  $R$  Square ialah 0,581. Koefisien kekambuhan dari variabel kualitas mendalam tunggal ( $X_3$ ) ialah 0,379. Ini berarti setiap kenaikan 1% kualitas etika individu meningkatkan fraud pembukuan sebesar 0,379. Grand Theory yang dipakai ialah *Fraud Triangel Theory*, khususnya Opportunity. Dari hasil eksplorasi menerangkan taksir  $t_{hitung} = 6,356 > t_{tabel} = 1,9755$  dengan derajat kritis  $0,002 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diakui. Penyelidikan menemukan tekad tunggal mempengaruhi kesalahan penyajian pembukuan, sehingga memperlakukan BUMDES di Kabupaten Banjar ialah dengan membujuk perwakilan guna lebih mengembangkan disiplin kerja dimiliki oleh pekerja sehingga dapat bekerja secara ideal. Kekeliruan dalam sebuah yayasan dipengaruhi oleh kualitas luar biasa dari perwakilan bekerja di dalamnya. Sebuah organisasi pasti mempunyai banyak orang bekerja di setiap bagian. Setiap individu secara positif mempunyai derajat kualitas mendalam berbeda dan secara substansial mempengaruhi kecenderungan kecurangan mungkin muncul. Didukung hasil eksplorasi Hartati, et al (2020) melisankan kualitas etika tunggal mempunyai hasil konstruktif kritis pada kecenderungan fraud pembukuan, dan menyiratkan semakin tinggi tingkat kualitas mendalam individu, semakin rendah kecenderungan guna menyampaikan misrepresentasi. Hasil penelitian menerangkan kualitas tunggal mendalam terhadap fraud pembukuan. Sehingga diduga kualitas etika tunggal terhadap fraud pembukuan pada BUMDES di Kabupaten Banjar.

### Simpulan dan Saran

Mengingat hasil pemeriksaan, diulaskan: (1) Tata kelola yang baik berdampak positif dan substansial terhadap kecurangan pembukuan di BUMDES Kabupaten Banjar, (2) Pengendalian internal berpengaruh positif dan kritis terhadap kesalahan penyajian pembukuan di BUMDES Kabupaten Banjar, (3) Moralitas individu secara fundamental mempengaruhi kecurangan pembukuan di BUMDES Kabupaten Banjar.



Mengingat hasil penelitian, pemaparan dan simpulan di atas membentuk beberapa saran berikut. (1) Bagi organisasi, dipercaya untuk menghindari dan mencegah kecurangan pembukuan, dipercaya ada pemisahan kewajiban dan kapasitas di masing-masing divisi pembukuan serta memperkenalkan laporan keuangan, pekerja layak mewujudkan laporan pameran berisi sinopsis latihan dan hasil dicapai dari setiap program selaras dengan standar bersangkutan. Selain itu, ialah normal organisasi mewujudkan standar administrasi yang baik, pengendalian batin, dan kualitas etika individu hebat menjadi kenyataan. Selanjutnya, diandalkan guna mencegah dan mengurangi kecurangan. (2) Guna analisis tambahan tertarik berkonsentrasi pada perspektif perbandingan, ibarat administrasi yang baik, kontrol batin dan kualitas mendalam individu, diharapkan mengembangkan penelitian memakai topik eksplorasi lebih luas. Selain itu, diharapkan juga mengamati faktor-faktor lain secara pasti diduga mempengaruhi fraud pembukuan ibarat penerapan aturan, pemerataan distributif, pemerataan prosedural, tanggung jawab hierarkis, dan budaya moral organisasi.

### Daftar Rujukan

- Adelin, Vani. 2013. *Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Perilaku Tidak Etis terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*. Skripsi: Universitas Negeri Padang.
- Association of Certified fraud Examiners. 2012. *Report to the Nations 2012 Global fraud StudyLetter from the President & CEO*.
- Eliza, Yulina. 2015. Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada SKPD Di Kota Padang). *Jurnal Akuntansi Media Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol.4 No.1.
- Fitri, Yulita. 2016. Pengaruh Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Akuntansi, Asimetri Informasi dan Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau). *Jurnal Online Mahasiswa*.Vol.3 No.1.
- Hartati, I., Purnamasari, P., & Sukarmanto, E. 2020. *Pengaruh Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Kecerdasan Spiritual sebagai Variabel Moderasi*. 270–274.
- Hermiyetti, H. and Manik, E.N. 2010. *The influence of good corporate governance mechanism on earnings management: empirical study in Indonesian Stock Exchange listed company for periods of 2006–2010*. Indonesian Capital Market Review.
- Husna, Aftina Nurul, Frieda NRH, Jati Ariati. 2008. Regulasi Diri Mahasiswa Berprestasi. *Jurnal Psikologi*. (Semarang: Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro).
- Kurniawan, Pratomo Cahyo dan Khairina Nur Izzaty. 2019. Pengaruh Good Corporate Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud. *Journal Of Economics and Banking*, Vol.1 No.1.
- Kusumastuti, Nur Ratri. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel Intervening*. Skripsi. Universitas Diponegoro
- Liyarachi, G., dan Newdick, C., 2009, "The Impact of Oral Reasoning and Retaliation on Whistle-Blowing: New-Zealand Evidence", *Journal of Business Ethics*, Vol. 89.
- Pangestika, Fierda. 2016. *Pengaruh Pengendalian Internal, Good Governance, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung*. Skripsi. Universitas Negeri. Yogyakarta.
- Putri, A. A. P. A. 2014. Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta. Nominal: *Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*
- Ratnayani, Putu Ayu. 2014. *Pengaruh Pengendalian Intern Kas Dan Implementasi Good Governance Terhadap Fraud (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Buleleng)*. Jurnal Akuntansi S1, Vol: 2 No:1.
- Saftarini, Putu Rita. 2015. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi Dan Implementasi Good Governance Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud)

- Akuntansi (Studi Empiris Pada SKPS Di Kabupaten Bangli). *Jurnal Akuntansi S1*. Vol. 3 No.1.
- Suartini, N. L. P., & Sari, M. (2020). Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi dan Kesesuaian Kompensasi pada Kecurangan Akuntansi Ni. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(2), 319– 333. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i02.p04>
- Tunggal, Amin Widjaja. 1992. *Activity Based Costing Suatu Pengantar*. Rineka Cipta: Jakarta -----. 2010. *Teori dan Praktek Auditing*. Jakarta: Harvarindo.
- Yuliani, Silvia. 2018. Pengaruh Perilaku Tidak Etis, Pengendalian Internal dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Instansi Pemerintahan Kab. Pasaman Barat). *Jurnal Akuntansi*. Vol. 6 No. 3
- Zainal, R. 2013. *Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, asimetri informasi Dan kesesuaian kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud)*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.